



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 367/I.09/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Peta Jabatan.
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja.
- KETIGA : Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk :
- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
 - b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;

- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- f. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- g. program promosi pegawai;
- h. reward dan punishment terhadap unit atau pejabat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 April 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BKD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 367/I.09/HK/2021
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR
 LAMPUNG

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANALISIS BEBAN KERJA		
		JUMLAH BEBAN KERJA UNIT	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA
1.	Sekretaris Daerah	1,2575	1	1
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,1958	1	1
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,1842	1	1
4.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	1,1917	1	1
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1,0675	1	1
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1,0683	1	1
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1,0350	1	1
8.	Bagian Organisasi	17,4197	17	12
9.	Bagian Kerjasama	3,7004	14	5
10.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1,9775	10	4
11.	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	987,585	68	10
12.	Bagian Perekonomian	11,2934	16	10
13.	Bagian Umum	32,0487	18	18

14.	Bagian Hukum	14,9874	14	9
15.	Bagian Tata Pemerintahan	0,6826	17	17
16.	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	9,7842	23	22
17.	Bagian Administrasi Pembangunan	13,2181	12	12
18.	Bagian Protokol	19,4503	40	40
19.	Sekretariat DPRD	42,1208	61	61
20.	Inspektorat	29,1447	72	72
	BADAN			
21.	Badan Kepegawaian Daerah	20,8450	62	46
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,5632	45	45
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,3535	120	63
24.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	66,8482	138	118
25.	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	68,4568	383	202
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,4654	32	24
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	105,111	106	90
28.	RSUD A. Dadi Tjokrodipo	640,3308	343	188
	DINAS			
29.	Dinas Koperasi Dan UKM	44,2595	44	25
30.	Dinas Pangan	77,3019	154	131
31.	Dinas Pariwisata	37,5214	37	32
32.	Dinas Pendidikan	5,5896	5.519	3.302
33.	Dinas Perdagangan	119,5214	119	105
34.	Dinas Perindustrian	33,5218	33	22
35.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	81,9162	81	33
36.	Dinas Pertanian	121,2146	121	121
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	46,5821	46	23

38.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	78,7861	80	36
39.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	59,9524	59	30
40.	Dinas Pekerjaan Umum	238,985	223	81
41.	Dinas Sosial	2,570	66	39
42.	Dinas Kesehatan	285,6248	2.193	1.176
43.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,2597	111	96
44.	Dinas Perhubungan	443,8566	440	404
45.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	60,97313	64	36
46.	Dinas Tenaga Kerja	58,3754	83	32
47.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	42,29576	41	41
48.	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	87,93333	54	30
49.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63,6278	62	34
50.	Dinas Lingkungan Hidup	105,5217	1.084	231
51.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108,3952	106	81
	KECAMATAN			
52.	Kec. Bumi Waras	64,09897	77	33
53.	Kec. Enggal	74,47364	66	32
54.	Kec. Kedamaian	47,3466	31	18
55.	Kec. Kedaton	48,5328	96	44
56.	Kec. Kemiling	45,5716	96	44
57.	Kec. Labuhan Ratu	30,304583	33	14
58.	Kec. Langkapura	40,52979	95	65
59.	Kec. Panjang	30,63986	72	21
60.	Kec. Rajabasa	44,89701	152	72
61.	Kec. Sukabumi	46,1284	65	65
62.	Kec. Sukarame	104,8232	87	56

63.	Kec. Tanjung Senang	40,75847	78	45
64.	Kec. Teluk Betung Barat	27,65194	78	29
65.	Kec. Teluk Betung Selatan	93,15924	90	38
66.	Kec. Teluk Betung Timur	48,53280	94	55
67.	Kec. Teluk Betung Utara	56,67058	60	60
68.	Kec. Tanjung Karang Barat	55,84481	162	88
69.	Kec. Tanjung Karang Pusat	55,844806	129	75
70.	Kec. Tanjung Karang Timur	95,6679	219	111
71.	Kec. Way Halim	40,80104	126	69

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA